

***FRAUD PREVENTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH
ACCOUNTABILITY PRACTICES, COMMUNITY PARTICIPATION,
WHISTLEBLOWING AND VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE
(EMPIRICAL STUDY IN KALIWIRO DISTRICT, WONOSOBO REGENCY)***

**PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PRAKTIK
AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, WHISTLEBLOWING DAN
KINERJA PEMERINTAH DESA
(STUDI EMPIRIS PADA KEC. KALIWIRO KAB. WONOSOBO)**

Ahmad Toyib¹, Romadhon², Susanti³

Program Studi Akuntansi, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo^{1,2,3}

ahmadtoyib053@gmail.com¹

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of accountability practices, community participation, whistleblowing, and government performance on fraud prevention in the management of village funds in Kaliwiro Sub-district. This research uses a quantitative approach, with a population of 261 village officials in Kaliwiro Subdistrict. The research sample consisted of 73 respondents selected using Taro Yamane formula and purposive sampling technique. The research process was carried out according to scientific procedures, although there were limitations, namely data collection only included village officials who were easy to reach. The data obtained were processed and analyzed using the SPSS 25 program with classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing. The results showed that the independent variables (accountability practices, community participation, whistleblowing, and government performance) together had an influence of 67.9% on the dependent variable, namely fraud prevention in the management of village funds. In addition, each independent variable has a positive and significant influence on the dependent variable.

Keywords: *Accountability, Participation, Whistleblowing, Performance, Fraud Prevention*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik akuntabilitas, partisipasi masyarakat, whistleblowing, dan kinerja pemerintah terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi berupa perangkat desa di Kecamatan Kaliwiro yang berjumlah 261 orang. Sampel penelitian terdiri dari 73 responden yang dipilih menggunakan rumus Taro Yamane dan teknik purposive sampling. Proses penelitian dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, meskipun terdapat keterbatasan, yaitu pengumpulan data hanya mencakup perangkat desa yang mudah dijangkau. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan program SPSS 25 dengan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen (praktik akuntabilitas, partisipasi masyarakat, whistleblowing, dan kinerja pemerintah) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 67,9% terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, setiap variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Partisipasi, Whistleblowing, Kinerja, Pencegahan Fraud.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara administratif berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Untuk mempertegas fungsi, kewenangan, serta memperkuat kedudukan desa, pemerintah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Sebagai organisasi pemerintahan terkecil, desa memerlukan pengelolaan dan penataan yang baik. Menurut Kuswanti (2020), penataan desa mencakup pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Salah satu tujuan pengaturan ini adalah untuk

memperjelas tugas dan fungsi desa, khususnya dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun merupakan bagian terkecil dari pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya secara mandiri dan harus bertanggung jawab atas segala aktivitasnya, termasuk tata kelola keuangan. Untuk mendukung pengelolaan desa yang baik dan mendorong kemajuan desa, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa.

Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa untuk meningkatkan kemandirian desa. Sumber dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang minimal

10% dari Dana Alokasi Umum, ditambah dengan Dana Bagi Hasil. Alokasi dana desa ini bertujuan untuk membantu desa mengembangkan potensi dan kemampuan lokalnya.

Disisi lain dengan meningkatnya jumlah anggaran desa per tahun mempunyai resiko yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa, yakni kemungkinan bias timbulnya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh seorang yang mengelola dana desa itu. Fraud adalah perbuatan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan cara memperoleh uang, asset serta lain-lain alhasil bisa merugikan orang lain atau pihak tertentu menurut Aini et al., (2017) dalam Laksmi dan Sujana (2019). Berikut adalah data alokasi dana di setiap desa di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

Tabel 1. Dana Desa Kec. Kaliwiro

Nama Desa	2019	2020	2021	2022
Lamuk	Rp 1.462.861.942	Rp 1.844.611.183	Rp 1.399.993.028	Rp 1.456.125.066
Tanjunganom	Rp 1.404.539.295	Rp 1.533.262.240	Rp 2.077.810.520	Rp 2.126.141.777
Kauman	Rp 1.377.505.825	Rp 1.504.619.981	Rp 1.688.882.182	Rp 1.507.537.559
Pesodongan	Rp 1.393.658.709	Rp 1.590.796.214	Rp 1.643.539.587	Rp 1.814.378.383
Ngadisono	Rp 1.359.582.406	Rp 1.522.248.453	Rp 1.559.267.892	Rp 1.673.832.408
Winongsari	Rp 1.323.094.883	Rp 1.452.517.817	Rp 1.485.414.647	Rp 1.806.274.532
Kaliguwo	Rp 1.311.088.170	Rp 1.443.954.822	Rp 2.351.464.536	Rp 1.852.401.833
Tracap	Rp 1.293.983.313	Rp 1.344.952.269	Rp 2.270.591.631	Rp 1.744.286.255
Pucungkerep	Rp 1.294.056.699	Rp 1.622.958.547	Rp 1.664.825.080	Rp 1.510.322.797
Kemiriombo	Rp 1.043.214.791	Rp 1.403.214.570	Rp 1.576.080.045	Rp 1.430.607.786
Grugu	Rp 1.165.909.539	Rp 1.380.557.243	Rp 1.593.084.771	Rp 1.392.392.978
Selomanik	Rp 1.145.790.955	Rp 1.354.979.611	Rp 1.516.961.645	Rp 1.467.259.577
Medono	Rp 1.221.417.210	Rp 1.389.323.168	Rp 1.645.942.002	Rp 1.555.828.050
Sukoreno	Rp 1.203.405.550	Rp 1.283.800.635	Rp 1.513.260.460	Rp 1.508.898.261
Lebak	Rp 1.220.278.779	Rp 1.185.451.846	Rp 1.221.926.754	Rp 1.178.901.395
Purwosari	Rp 1.213.345.584	Rp 1.242.779.902	Rp 1.403.285.061	Rp 1.878.615.790
Ngasinan	Rp 1.380.061.860	Rp 1.292.838.175	Rp 1.410.144.290	Rp 1.718.429.938
Cledok	Rp 1.198.268.312	Rp 1.307.574.059	Rp 1.567.477.138	Rp 1.304.982.937
Bendungan	Rp 1.129.015.600	Rp 1.177.972.097	Rp 898.264.281	Rp 1.285.822.739

Gambaran	Rp 1.115.918.531	Rp 1.187.052.006	Rp 1.565.196.123	Rp 1.065.432.108
Jumlah	Rp 25.256.997.953	Rp 28.065.464.838	Rp 32.053.411.673	Rp 31.278.472.169

Dana desa saat ini memiliki potensi yang tinggi untuk disalahgunakan. Kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi dan cenderung meningkat. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 187 kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa selama tahun 2023 saja. Kasus-kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 162,2 miliar. ICW menyebutkan bahwa peningkatan korupsi di tingkat desa terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur alokasi dana desa. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan Rp 68 triliun untuk 75.265 desa di Indonesia, dengan rata-rata dana desa yang dikelola setiap desa sebesar Rp 903 juta (KOMPAS.COM, 20/05/2024).

Beberapa faktor dianggap memengaruhi upaya pencegahan

TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan Fraud

Tuanakotta (2017:226) mendefinisikan fraud sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi, seperti penjualan aset negara secara ilegal, pemberian suap (kickbacks) dalam pengadaan barang atau jasa, penyuapan, dan penggelapan dana pemerintah. Albrecht et al. (2017:7) menjelaskan fraud sebagai tindakan yang menggunakan keterampilan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara yang salah. Wonar et al. (2018) menganggap fraud sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti manipulasi informasi (misleading) yang

kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian Rega Yanuar Siswayanti (2022), terdapat empat hipotesis mengenai faktor yang berperan dalam pencegahan fraud dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel, yaitu pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan sistem whistleblowing, memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Namun, variabel kepatuhan pelaporan keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Penelitian ini mereplikasi studi yang dilakukan oleh Rega Yanuar Siswayanti (2022), dengan perbedaan pada variabel independen yang digunakan dan lokasi penelitian. Peneliti menambahkan variabel akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa, sementara dua variabel dari penelitian sebelumnya, yaitu whistleblowing dan partisipasi masyarakat, tetap dipertahankan.

menguntungkan individu atau kelompok tertentu namun merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Rini Sartini (2020:78), pencegahan fraud dapat diukur menggunakan empat indikator:

1. Analisis risiko
2. Implementasi
3. Hukuman
4. Tinjauan

Praktik Akuntabilitas

Praktik akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan hasil atau kegagalan kerja kepada pihak pemberi amanah hingga mereka merasa puas. Dalam pengelolaan keuangan,

akuntabilitas berfokus pada pelaporan yang akurat dan tepat waktu terkait penggunaan dana publik. Laporan ini biasanya diaudit secara profesional untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Nuritomo & Rossieta, 2014).

Sari dan Wahidahwati (2018) mengidentifikasi tiga indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan dan pengawasan
3. Pertanggungjawaban

Penelitian Lianita Puspita Dewi (2022) menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pencegahan fraud. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin rendah risiko terjadinya kecurangan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Enita Binawati dan Junaidi Affan (2023), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dalam mencegah fraud, khususnya pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia et al. (2015:196), partisipasi adalah tindakan seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari penyusunan program, perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan.

Marschall (2006) mengidentifikasi tiga indikator partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Pengorganisasian masyarakat

2. Kemampuan masyarakat
3. Peran masyarakat

Penelitian Rega Yanuar Siswayanti (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Peran masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pelaporan menjadi faktor penting dalam mencegah fraud. Sebaliknya, penelitian Delvira Eka Selvia dan Fefri Indra Arza (2023) di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Whistleblowing

Whistleblowing adalah tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang masih aktif maupun nonaktif, terkait pelanggaran, tindakan ilegal, atau tindakan tidak bermoral kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Sistem whistleblowing menjadi sarana efektif untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan (Widiyarta et al., 2017).

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:90), whistleblowing dipengaruhi oleh tiga aspek utama:

1. Aspek struktural
2. Aspek operasional
3. Aspek perawatan

Penelitian Rega Yanuar Siswayanti (2022) menunjukkan bahwa peningkatan tindakan whistleblowing berkorelasi positif dengan meningkatnya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Lianita Puspita Dewi

(2022), yang menyatakan bahwa semakin tinggi niat individu untuk melakukan whistleblowing, semakin efektif pencegahan fraud.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3: Whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa, menurut Kasmir (2019:181), adalah hasil kerja dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam periode tertentu. Kinerja ini mencerminkan kualitas dan produktivitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan perannya.

Menurut Kusnendar (2019), indikator kinerja aparatur pemerintah desa meliputi:

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas

Penelitian Lisa Yunita Sari (2024) menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik kinerja aparatur desa, semakin tinggi efektivitas pencegahan kecurangan.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan adalah:

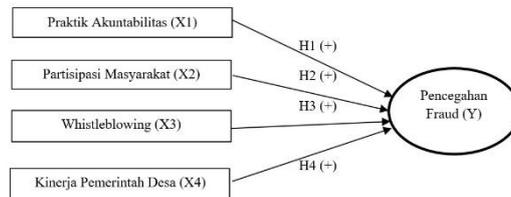
H4: Kinerja pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Variabel	Hasil
1.	Rega Yanuar Siswayanti (2022)	Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Sistem Internal, Masyarakat, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Kalianget)	Analisis Regresi Linier Berganda	Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2) Partisipasi Masyarakat (X3) Whistleblowing System (X4)	Tidak Berpengaruh Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
2.	Lianita Puspita Dewi (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Dan Akuntabilitas, Dan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten)	Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi Aparatur (X1) Moralitas Individu (X2) Budaya Organisasi (X3) Praktik Akuntabilitas (X4) Whistleblowing (X5)	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Tidak Berpengaruh Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif

3.	Enita Binawati Dan Junaidi Affan (2023)	Pencegahan Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistle Blowing, Kompetensi Dan Pengendalian Internal	Fraud Dana Desa, Akuntabilitas, Blowing, Aparatur Pengendalian	Analisis Regresi Linier Berganda	Akuntabilitas (X1) Whistle Blowing (X2) Kompetensi Aparatur (X3) Pengendalian Internal (X4)	Berpengaruh Positif Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh
4.	Lisa Yunita Sari (2024)	Pengaruh Aparatur Desa, Dan Terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa Di Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas	Kinerja Pemerintah Dan Integritas Pencegahan Pengelolaan Dana Kecamatan Kabupaten	Analisis Regresi Linier Berganda	Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (X1) Pengendalian Internal (X2) Integritas (X3)	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
5.	Delvira Eka Selvia Dan Fefri Indra Arza (2023)	Pengaruh Dan Partisipasi Terhadap Kecurangan Dana Desa	Transparansi, Informasi, Dan Masyarakat Potensi	Analisis Regresi Linier Berganda	Transparansi (X1) Asimetri Informasi (X2) Partisipasi Masyarakat (X3)	Tidak Berpengaruh Berpengaruh Positif Tidak Berpengaruh

KERANGKA PIKIR



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020:16), metode penelitian kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui alat seperti kuesioner, observasi, atau eksperimen, yang kemudian

dianalisis menggunakan teknik statistik guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan terukur.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, yang berjumlah 261 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang dipilih adalah perangkat desa yang telah menjabat selama minimal tiga tahun.

Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Taro Yamane dengan populasi 261 orang dan tingkat toleransi kesalahan (e) sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad n = \frac{261}{1+261.0,1^2} \quad n = 72,3$$

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Taro Yamane, jumlah sampel yang dibulatkan adalah sebanyak 73 orang. Dengan demikian, sampel dari populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 73 responden.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2018:456), sumber data merujuk pada pihak yang menyediakan informasi untuk pengumpulan data. Sumber data dibagi menjadi dua jenis:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Informasi ini sangat penting untuk memahami tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan atau referensi yang relevan dengan penelitian. Data ini

bersifat melengkapi atau mendukung data primer, dan diperoleh dari sumber seperti buku, literatur, atau internet yang terkait dengan variabel penelitian.

Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **kuesioner**. Kuesioner adalah alat berupa serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi langsung dari responden. Responden diminta menjawab sesuai dengan pandangan, pengalaman, atau preferensi mereka. Kuesioner ini dapat disebar secara langsung, dan data yang terkumpul dianalisis untuk memahami pendapat atau persepsi responden mengenai topik penelitian.

Jawaban responden pada kuesioner diukur menggunakan **skala Likert**, yang menyediakan lima tingkatan preferensi jawaban berdasarkan pendapat responden. Berikut adalah opsi yang digunakan dalam skala Likert pada penelitian ini:

Pernyataan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai data yang diteliti. Teknik ini melibatkan pengamatan terhadap berbagai nilai statistik, seperti rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, total, rentang, kurtosis, serta skewness. Statistik deskriptif membantu dalam

memahami karakteristik data, seperti pemusatan data, tingkat variabilitas, serta pola distribusi atau penyimpangan data.

2. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan atau menentukan apakah model tersebut memenuhi kriteria **goodness of fit** sehingga dapat diinterpretasikan (Ghozali, 2018). Uji

ini dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Jika nilai signifikansi F kurang dari 5%, maka model regresi dianggap valid untuk memprediksi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen dianggap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai probabilitas signifikansi memenuhi kriteria yang ditentukan. Nilai t-hitung dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 5%, dengan derajat kebebasan (df) dihitung sebagai $df = (n-k)$ dan $(k-1)$, di mana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Jika regresi melibatkan lebih dari dua variabel independen, **Adjusted R Square** digunakan sebagai ukuran koefisien determinasi untuk menyesuaikan jumlah variabel independen dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Std. Deviation	Rata-rata aktual	Kisaran Aktual	Kisaran Teoritis	Rata-rata Teoritis
Praktik Akuntabilitas	1.686	12.18	9-15	3-15	9
Partisipasi Masyarakat	1.927	12.40	9-15	3-15	9
Whistleblowing	2.204	12.32	9-15	3-20	9
Kinerja Pemerintah desa	2.047	16.32	12-20	4-20	12
Pencegahan Fraud	2.215	16.62	12-20	4-20	12

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Analisis Data Berdasarkan Tabel 3.1

Dari Tabel 3 dapat diperoleh informasi mengenai standar deviasi, kisaran nilai, dan rata-rata jawaban dari setiap variabel yang diteliti. Berikut penjelasan rinci:

1. Praktik Akuntabilitas (X1)

Kisaran aktual jawaban adalah 9 hingga 15, yang berada dalam kisaran teoritis 3 hingga 15. Rata-rata aktual adalah 12,18, dengan standar deviasi 1,686, sementara rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa responden

menilai praktik akuntabilitas telah diterapkan dengan baik untuk meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Partisipasi Masyarakat (X2)

Kisaran aktual jawaban adalah 9 hingga 15, dengan kisaran teoritis 3 hingga 15. Rata-rata aktual mencapai 12,40, dengan standar deviasi 1,927, sementara rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dalam mendukung upaya pencegahan

kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

3. Whistleblowing (X3)

Kisaran aktual jawaban adalah 9 hingga 20, yang berada dalam kisaran teoritis 3 hingga 15. Rata-rata aktual tercatat sebesar 12,32, dengan standar deviasi 2,240, sementara rata-rata teoritis adalah 9. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa whistleblowing telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa untuk membantu mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

4. Kinerja Pemerintah Desa (X4)

Kisaran aktual jawaban berada antara 12 hingga 20, dengan kisaran teoritis 4 hingga 20. Rata-rata aktual sebesar

16,32, dengan standar deviasi 2,047, sementara rata-rata teoritisnya adalah 20. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa telah berjalan dengan baik dalam mendorong pencegahan kecurangan.

5. Pencegahan Fraud (Y)

Kisaran aktual jawaban adalah 12 hingga 20, yang berada dalam kisaran teoritis 4 hingga 20. Rata-rata aktual sebesar 16,62, dengan standar deviasi 2,215, sementara rata-rata teoritisnya adalah 20. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kecurangan telah dilakukan dengan baik.

Tabel 4. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	246.305	4	61.576	39.149	.000 ^b
Residual	106.955	68	1.573		
Total	353.260	72			

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat bahwa nilai statistik F yang dihitung adalah 39,149. Untuk sampel sebanyak 73, dengan 4 variabel independen dan tingkat signifikansi 0,05, nilai F tabel dapat dicari menggunakan rumus $F(k; n-k)$ atau $F(4; 94-4)$. Setelah mencari nilai F pada tabel distribusi, didapatkan nilai F tabel sebesar 2,50. Dengan perbandingan ini,

terlihat bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Selain itu, hasil uji F pada Tabel 3.2 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi penelitian ini sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan dapat diterapkan untuk memprediksi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Tabel 5. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.412	1.431		1.685	.097
Praktik Akuntabilitas	.207	.099	.158	2.082	.041
Partisipasi Masyarakat	.298	.137	.259	2.169	.034
Whistleblowing	.352	.129	.350	2.720	.008
Kinerja Pemerintah desa	.224	.112	.207	2.007	.049

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel praktik akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,041, yang lebih kecil dari 0,05, dengan thitung = 2,082 dan ttabel = 1,993. Karena thitung > ttabel, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Y).
2. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi 0,034, yang lebih kecil dari 0,05, dengan thitung = 2,169 dan ttabel = 1,993. Karena thitung > ttabel, maka H2 diterima. Ini berarti partisipasi masyarakat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Y).
3. Variabel whistleblowing menunjukkan nilai signifikansi 0,008, yang lebih kecil dari 0,05, dengan thitung = 2,720 dan ttabel = 1,993. Karena thitung > ttabel, maka H3 diterima. Dengan demikian, whistleblowing (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Y).
4. Variabel kinerja pemerintah desa memiliki nilai signifikansi 0,049, yang lebih besar dari 0,05, dengan thitung = 2,007 dan ttabel = 1,986. Karena thitung > ttabel, maka H4 diterima. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Y).

Tabel 6. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.679	1.254

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Partisipasi, Whistleblowing

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R square) adalah 0,679, atau sebesar 67,9%. Ini berarti bahwa pengaruh dari praktik akuntabilitas (X1), partisipasi masyarakat (X2), whistleblowing (X3), dan kinerja pemerintah desa (X4) terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Y) di desa Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo adalah 67,9%. Sementara itu, sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Praktik Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel 3.3, diperoleh nilai signifikansi 0,041, yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai thitung = 2,082 yang lebih besar dari ttabel = 1,993. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianita Puspita Dewi (2022), yang menyatakan bahwa praktik akuntabilitas

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian lain oleh Enita Binawati dan Junaidi Affan (2023) juga memberikan hasil yang serupa, yaitu bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas di Kecamatan Kaliwiro telah dilaksanakan dengan baik, meliputi perencanaan dan penetapan tahapan yang diperlukan, pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, serta pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada tabel 3.3, nilai signifikansi adalah 0,034, yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai $t_{hitung} = 2,169$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,993$. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari partisipasi masyarakat terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis H2 tentang pengaruh partisipasi masyarakat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Rega Yanuar Siswayanti (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Namun, penelitian oleh Enita Binawati dan Junaidi Affan (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Kaliwiro telah berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa, melalui pembentukan organisasi masyarakat yang menampung aspirasi serta berperan dalam proses

pengambilan keputusan. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan dan terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat terbukti dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro.

Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada tabel 3.3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008, yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai $t_{hitung} = 2,720$ yang lebih besar dari $t_{tabel} = 1,993$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis H3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rega Yanuar Siswayanti (2022), yang juga menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Peneliti lain, Lianita Puspita Dewi (2022), juga mendapatkan hasil serupa, bahwa whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini menunjukkan bahwa di pemerintahan desa telah diterapkan sistem whistleblowing yang efektif, dengan melibatkan aspek struktural, operasional, dan pemeliharaan yang dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada tabel 3.3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049, yang lebih

kecil dari 0,05, serta nilai thitung = 2,007 yang lebih besar dari ttabel = 1,993. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis H4 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lisa Yunita Sari (2024), yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa, yang meliputi faktor produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan tanggung jawab, dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro. Kemampuan organisasi untuk mengenali dan mengembangkan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, serta tanggung jawab pelaksanaan kegiatan organisasi yang sesuai dengan prinsip administrasi, berperan penting dalam mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di daerah ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro, yang melibatkan 73 responden, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang diuji, yaitu praktik akuntabilitas, partisipasi masyarakat, whistleblowing, dan kinerja pemerintah desa, memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Pertama, praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, yang berarti bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Kedua,

partisipasi masyarakat juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, yang menggambarkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Ketiga, mekanisme whistleblowing yang diterapkan di pemerintahan desa terbukti efektif dalam mencegah fraud, karena sistem pengaduan yang baik memberikan dampak positif dalam pengawasan dana desa. Terakhir, kinerja pemerintah desa menunjukkan pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, yang menandakan bahwa kinerja perangkat desa yang baik dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa. Semua hipotesis dalam penelitian ini diterima, menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berkontribusi dalam mencegah fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro. Praktik akuntabilitas, partisipasi masyarakat, whistleblowing, dan kinerja pemerintah desa secara keseluruhan memiliki peran penting dalam pencegahan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro. Keempat faktor ini saling mendukung untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Priandani dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Afida Putri Eka Kuswanti, K. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas,*

- Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-22.
- Andriani. (2019). Pengertian Partisipasi Masyarakat. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018*, 10–39.
- Binawati, E., & Affan, J. (2023). Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas, Whistle Blowing, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(1), 75–92. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i1.774>
- Bougie, S. dan. (2019). Metoda Penelitian. *Bab III Metoda Penelitian*, 170.
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2798–8961, 334–344. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/3479>
- Ernawan Septia Putri Ussholehah, & Anggoro, R. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 35(2), 103–117. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i2.136>
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.143-154>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Henriawan, D. (n.d.). *Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*. 1049–1059.
- Ii, B. A. B., & Hipotesis, D. A. N. (2011). *Whistleblowing System / ENGIE*. <https://www.engie.com/en/ethics-and-compliance/whistleblowing-system>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>

- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48.
<https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- Kompetensi, P. (2024). *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*. 5(4).
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182.
- Novi, A. (2018). Dukungan Organisasi Terhadap Whistleblowing TPOB Theory. *Whistleblowing, 1986*, 2013–2015.
- Pada, S., Badan, P., & Keuangan, P. (n.d.). *PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KESADARAN ANTI-FRAUD TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD THE EFFECT OF INTERNAL AUDIT AND ANTI-FRAUD*. 21119159.
- Raharja, D. P., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Bangsal. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3384–3398.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5283>
- Sari, L. Y., Masnila, N., & Indriasari, D. (2024). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas*. 10(5), 2874–2878.
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 279–291.
<https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1815>
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223.
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.707>
- Siswayanti, R. Y. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Kalianget)* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja Madura).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*.
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4).
<https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>